

## Komunikasi Organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa

*Organizational Communication of the Bogor Regency Government in the Village Infrastructure Financial Assistance Program*

<sup>1</sup>Andi Ahmadi, <sup>2</sup>Amiruddin Saleh, <sup>3</sup>Wahyu Budi Priatna

<sup>1</sup>Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University, Bogor, 16680

<sup>2</sup>Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University, Bogor, 16680

<sup>3</sup>Program Studi Komunikasi, Sekolah Vokasi IPB University, Bogor, 16128

<sup>1</sup>E-mail korespondensi: [andibyan73@gmail.com](mailto:andibyan73@gmail.com)

Diterima : 11 Agustus 2025

Disetujui : 01 November 2025

### ABSTRAK

Studi ini mengeksplorasi pola komunikasi organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Satu desa diberikan dana maksimal satu miliar, sehingga program ini lebih dikenal dengan Satu Miliar satu Desa (Samisade). Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kritis. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bogor. Jumlah informan terdiri dari 10 kepala desa, sembilan camat. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Komunikasi vertikal—antara pejabat pemerintah tingkat tinggi dan aktor di tingkat desa—memiliki peran penting dalam penyebarluasan kebijakan, penyelesaian tugas, dan penegakan akuntabilitas; (2) Komunikasi horizontal antar instansi dan antar aktor sejauh memfasilitasi koordinasi dan pemahaman bersama, sedangkan komunikasi diagonal memungkinkan keterlibatan lintas fungsi, sehingga memperkuat kapasitas respons dan pemecahan masalah; dan (3) Terdapat empat strategi komunikasi utama yang digunakan pemerintah: strategi berbasis media (cetak, digital, dan media sosial), strategi instruksional (pelatihan teknis untuk bendagara dan staf desa), strategi pemasaran mengemas nilai pembangunan dengan, serta pendekatan budaya, agama dan sosial kemasyarakatan. Strategi pastisipatori dengan musdes, musrenbang desa, musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten. Strategi-strategi ini secara kolektif memperkuat kepatuhan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan. Hasil dari penelitian ini bahwa komunikasi organisasi dalam program Samisade, yang mengalir secara vertikal, horizontal dan diagonal mendukung proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program. Empat strategi komunikasi yang digunakan berdampak positif bagi pembangunan infrastruktur di pedesaan.

**Kata kunci:** Komunikasi organisasi, pembangunan pedesaan, program infrastruktur, strategi komunikasi

## ABSTRACT

*This study explores the organizational communication patterns of the Bogor Regency Government in implementing the Village Infrastructure Financial Assistance Program (Samisade). Conducted in selected urban and rural villages among every region of Bogor Regency, this research applies a critical qualitative approach to examine how vertical, horizontal, and diagonal communication flows contribute to the effectiveness of planning, execution, and evaluation processes. The findings reveal that: (1) vertical communication—between high-level government officials and village-level actors—plays a pivotal role in the dissemination of policies, task delegation, and accountability; (2) Horizontal communication among agencies and between peer actors facilitates coordination and shared understanding, while diagonal communication enables cross-functional engagement, strengthening responsiveness and problem-solving capacity, and; (3) There are four key communication strategies that used by the government: media-based strategy (print, digital, and social media), instructional strategies (technical training for village office staff), participatory mechanisms (Musrenbang and village meetings), and socio-cultural engagement (through initiatives program like Boling and Jumling). These strategies collectively enhance transparency, reinforce compliance, and foster community participation in rural development. The study concludes that an integrated and participatory communication system is essential for realizing sustainable, inclusive, and accountable rural infrastructure development, particularly in large and decentralized regions like Bogor Regency.*

**Keywords:** Communication Strategy, Organizational Communication, Public Infrastructure Program, Rural Development

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa menjadi prioritas utama pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang layak. Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam APBN dan APBD. Untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan sektor riil, menekan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial (Prasetyo & Firdaus, 2009).

Sejak tahun 2015, Dana Desa dialokasikan sebagai bentuk komitmen pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan otonomi kepada desa untuk mengelola program pembangunan tanpa intervensi instansi lain (Afriyanto, 2023). Di Kabupaten Bogor, bentuk perhatian ini diwujudkan melalui Samisade yang diluncurkan tahun 2021 sebagai bantuan keuangan tunai bagi desa. Program ini bertujuan membangun infrastruktur seperti jalan, irigasi, MCK, dan menara telekomunikasi di daerah blank spot (Mintarsih et.al, 2023). Samisade dilandasi oleh Peraturan Bupati Kabupaten Bogor No. 83 Tahun 2020 yang memperkuat

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan (Pemkab Bogor, 2020).

Dari sisi regulasi, program Samisade diperkuat dengan Peraturan Bupati No. 100 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa yang disahkan pada 1 November 2021 [Pemkab Bogor, 2021]. Program ini dimaksudkan sebagai stimulan percepatan pembangunan desa menuju kemandirian (Febrianti et al., 2023). Namun, penelitian Febrianti juga menemukan adanya kelemahan, seperti kesalahan administrasi dan lemahnya monitoring oleh tim verifikasi kecamatan. Koordinasi dan komunikasi antar tim pelaksana kegiatan juga dinilai belum maksimal. Penelitian sebelumnya belum menjabarkan secara deskriptif aliran komunikasi organisasi pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pokok permasalahan: bagaimana komunikasi organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Samisade; bagaimana komunikasi antara dinas teknis, kecamatan, kepala desa, dan serta strategi komunikasi pembangunan yang digunakan untuk mengefektifkan program sesuai harapan masyarakat (Michel D, et al 2025).

Komunikasi merupakan instrumen

penting dalam organisasi sebagai penghubung dan penggerak motivasi antar anggota untuk mencapai tujuan bersama. Hu & Ngai (2021) dan Wang & Liu (2022) menekankan bahwa komunikasi yang efektif merupakan pondasi utama bagi keberhasilan sebuah organisasi, terutama dalam konteks perubahan dan pembangunan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis aliran komunikasi organisasi antara pemerintah Kabupaten Bogor dan para pemangku kepentingan program Samisade. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjelaskan kontribusi komunikasi dalam mendukung keberhasilan program dan merumuskan strategi komunikasi pembangunan yang tepat

penelitian ini dilakukan pada Mei hingga Agustus 2024.

## METODE

Paradigma penelitian merupakan landasan dasar dalam memahami realitas pengetahuan. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang memandang ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami sekaligus mengubah struktur sosial yang timpang. Paradigma ini menyoroti isu ketimpangan, dominasi, dan ketidakadilan, serta berupaya mendorong transformasi sosial melalui kritik terhadap kekuasaan (Littlejohn & Foss, 2009). Ketimpangan sosial dalam penelitian terjadi ketika ada desa yang bermasalah dengan penggunaan dana Samisade, tidak mendapatkan sanksi. Menurut Mirza (2018), paradigma kritis memiliki empat prinsip utama: totalitas, kesadaran, alienasi, dan kritik, yang menjadi dasar dalam membongkar realitas sosial.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bogor, termasuk Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Bupati, Ketua DPRD, para kepala dinas dinas dan camat yang berhubungan langsung dengan program bantuan keuangan infrastruktur desa. Program ini diberikan kepada 416 desa yang ada di Kabupaten Bogor. Waktu

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan dan key informan, observasi langsung, serta keterlibatan peneliti sebagai partisipan. Informan terdiri dari kepala desa,

### Informan

No	Nama	Jabatan
1	Faka Harika	Kades Benteng Ciampea
2	Andi Supriadi	Kades Cigudeg
3	Asdi	Kades Kranggan Gn Putri
4	Jumedi	Plt Kades Tonjong Tajurhalang
5	Damanhuri.	Kades Gn Putri
	Dedi	Plt Kades Cidokom, Rumpin
6	Yayat S	Kades Darmaga
7	Deden Saepul	Kades Leuwinutug

### Key Informan

No.	Nama	Jabatan
1	Ade Yasin	Bupati Bogor 2019-2022
2	Iwan Setiawan	Plt Bupati Bogor 2024
3	Ajat Rohmat Djatnika	Sekda Kab

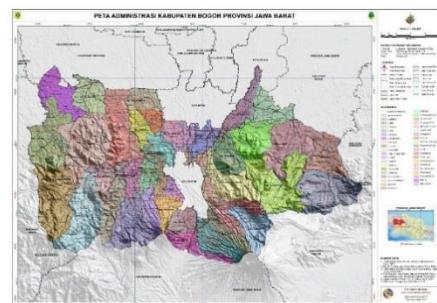
Data juga diperoleh dari dokumentasi, arsip, dan perangkat fisik, sesuai prinsip Yin (2013) mengenai penggunaan multi sumber bukti dan keterkaitan data dengan temuan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menelusuri urutan peristiwa, hubungan antar aktor, dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumen pendukung. Proses analisis mencakup membaca, mendengarkan, membandingkan data dengan teori, dan melakukan interpretasi atas fenomena komunikasi organisasi yang ditemukan. Pengamatan lapangan dan wawancara terbuka dengan masyarakat serta pengamat turut

camat, dan pejabat teknis seperti Bappeda Litbang, BPKAD, PUPR dan Inspektorat, serta pengusaha kontruksi. Key informant meliputi Bupat/wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda dan Kepala DPMD Kabupaten Bogor.

8	Edy Suwito	Camat Citeureup
9	Pardi	Camat Ciampea
10	Irvan Pramudia	Camat Tajurhalang
11	Tenny Ramdani	Camat Bojonggede
12	Ria Marlisa	Camat Sukaraja
13	Bambam Setia Aji	Kepala Bappeda Litbang
14	Sigit Wibowo	Kepala Inspektorat
15	Achmad Wildan	Sekdis BPKAD
16	Suryanto Putra	Kepala Dinas PUPR
17	Alexa Fahmi	Pengusaha Kontruksi

		Bogor
4	Rudy Syamsudin	Ketua DPRD Kab Bogor 2019-2024
5	Reynaldi Yushab	Kepala DPMD

memperkaya keakuratan data. Seluruh data kemudian diidentifikasi dan diinterpretasikan untuk menjelaskan praktik komunikasi organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan program Samisade.



Gambar 1 Peta Administrasi Lokasi Penelitian  
(Sumber: Bappedalitbang Kabupaten

Bogor, 2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

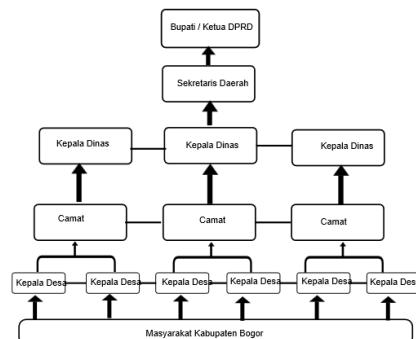
### Komunikasi Organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor pada Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa

Komunikasi merupakan instrumen penting dalam organisasi sebagai penghubung dan penggerak motivasi antar anggota untuk mencapai tujuan bersama. Hu & Ngai (2021) dan Wang & Liu (2022) menekankan bahwa komunikasi yang efektif merupakan pondasi utama bagi keberhasilan sebuah organisasi, terutama dalam konteks perubahan dan pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2011 disebutkan ada empat proses komunikasi yang dapat digunakan; komunikasi ke bawah, ke atas, horizontal, dan komunikasi diagonal. (KemenPAN-RB,2011). Komunikasi vertikal mencakup hubungan antara pimpinan dan bawahan dalam bentuk instruksi atau solusi, komunikasi horizontal terjadi antar unit atau pejabat setara dalam aktivitas kerja, sedangkan komunikasi diagonal melibatkan lintas fungsi dalam menyelesaikan masalah organisasi secara internal. Dalam pelaksanaan program Samisade, efektivitas komunikasi antara kepala daerah, kepala dinas, camat dengan kepala desa menjadi kunci keberhasilan, karena berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat keberhasilan program. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bogor masih menghadapi kendala koordinasi antar dinas dan kecamatan serta ketidaktepatan informasi program. Oleh karena itu, penguatan ketiga alur komunikasi organisasi sangat diperlukan agar implementasi program

berjalan optimal dan partisipatif (Mulawarman dan Rosilawati, 2014) (Purnomo, 2018).

### Alur Komunikasi Vertikal (*Upward and Downward Communication*)

Bessette (2021) dan Zheng et al. (2023) menggarisbawahi pentingnya pola komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal sebagai jalur komunikasi organisasi yang strategis untuk memastikan informasi tidak terjebak dalam hirarki struktural semata. Komunikasi vertikal dalam program Samisade terdiri dari komunikasi ke atas (*upward*) dan ke bawah (*downward*) yang membentuk alur dua arah antara masyarakat, aparatur desa, hingga pemerintah daerah. Komunikasi ke atas dimulai dari masyarakat desa yang menyampaikan aspirasi, keluhan, atau usulan kepada kepala desa. Informasi ini diteruskan ke camat, lalu ke kepala dinas, Sekretaris Daerah, dan akhirnya ke Bupati atau Ketua DPRD. Alur ini memungkinkan proses penyaringan, verifikasi, dan pelaporan yang sistematis sehingga isu-isu di lapangan dapat direspon oleh pengambil kebijakan. Komunikasi ke atas juga mencakup penyampaian ide, keluhan, hingga solusi yang diusulkan oleh pelaksana lapangan agar pekerjaan berjalan lebih efektif (Evelina & Angeline, 2019). Dengan sistem ini, suara masyarakat dapat mempengaruhi evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara tepat sasaran. (KemenPAN-RB, 2011).

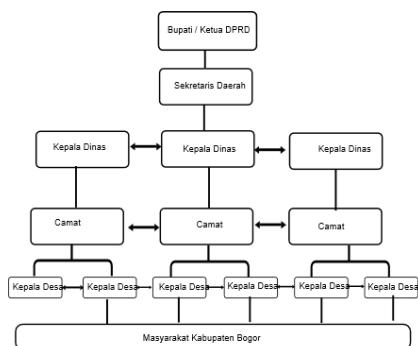


Gambar 2 Alur komunikasi vertikal

(*upward communication*) pada program bantuan dana infrastruktur desa

### Alur Komunikasi Horizontal

Komunikasi horizontal dalam program Samisade terjadi antara aktor-aktor pemerintahan yang berada pada level sejajar, seperti antar kepala dinas, camat, dan kepala desa. Komunikasi ini berfungsi sebagai sarana koordinasi, pertukaran informasi, penyamaan persepsi, serta pemecahan masalah teknis di lapangan (KemenPAN-RB, 2011). Di tingkat dinas, kolaborasi antara DPMD, Bappeda Litbang, BPKAD, dan Inspektorat memastikan program berjalan sesuai aturan. Camat juga menjalin komunikasi intensif untuk saling berbagi perkembangan, kendala, dan solusi wilayah masing-masing. Komunikasi horizontal dalam tata kelola pemerintahan bukan hanya berkuat pada mekanisme formal antarunit atau perangkat birokrasi, melainkan juga berlangsung secara cair dalam bentuk relasi keseharian (Warat dan Tuanaya, 2024). Media seperti rapat koordinasi dan grup WhatsApp menjadi alat komunikasi yang efektif dalam mempercepat respons lintas sektor. Oleh karena itu, komunikasi horizontal berperan penting dalam menjaga keselarasan antar bagian dalam birokrasi daerah.



Gambar 1 Alur komunikasi horizontal pada program bantuan dana infrastruktur desa

*"Kami para camat pada saat tertentu, misalnya saat bertemu dalam*

*rapat di Cibinong, diskusi juga tentang bagimana teknis perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi Samisade, di wilayah masing-masing"*

(KI, Camat Gunungputri)

Di tingkat desa, komunikasi horizontal berlangsung antar kepala desa melalui forum formal dan informal seperti paguyuban kepala desa dan rapat mingguan kecamatan. Kepala desa saling berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan teknis, kendala administratif, dan strategi pelaporan. Hubungan ini memperkuat solidaritas serta membentuk standar kerja bersama yang lebih efisien dan akuntabel. Komunikasi ini juga membantu menghindari kesalahan dalam penggunaan dana serta mempercepat penyelesaian kendala yang sama. Informasi evaluasi dan temuan lapangan dari kecamatan atau inspektorat pun dapat tersebar lebih merata dan cepat. Dengan demikian, komunikasi horizontal antar kepala desa berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Samisade secara kolektif dan terpadu (Firli, M, et al 2024)

Kepala desa merupakan sosok yang memiliki peran yang cukup sentral dalam menentukan keberhasilan organisasi pemerintahannya, sebagai pemimpin kepala desa bertindak sebagai orang yang lebih menonjol dan memiliki pengaruh besar di dalam organisasi, ia bertanggung jawab terhadap berbagai permasalahan maupun berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di dalam organisasi yang ia pimpin. (Fikri,2020)

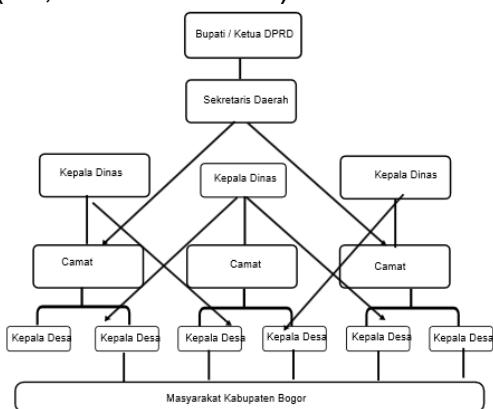
### Alur Komunikasi Diagonal

Komunikasi diagonal dalam program Samisade merujuk pada

komunikasi lintas saluran yang melibatkan aktor dari level dan unit organisasi berbeda, seperti kepala desa dengan kepala dinas atau camat dengan inspektorat (KemenPAN-RB, 2011). Pola ini menunjukkan fleksibilitas komunikasi di luar jalur birokrasi formal untuk mempercepat penyelesaian masalah teknis, administratif, dan koordinatif. Dalam praktiknya, komunikasi ini memfasilitasi konsultasi langsung, seperti kepala desa yang berkonsultasi dengan DPMD atau Inspektorat terkait pelaporan program Samisade, atau TPK yang berkoordinasi dengan UPT PUPR untuk verifikasi teknis. Alur ini memungkinkan respons yang cepat, adaptif, dan praktis terhadap dinamika lapangan. Komunikasi diagonal membantu mengatasi keterbatasan waktu dan struktur yang kaku dalam birokrasi. Dengan demikian, pola ini memberikan ruang solusi langsung yang efisien dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

*“Kami juga berkomunikasi dengan pihak DPMD dan inspektorat ... memastikan bahwa masalah kelanjutan pengaspalan atau betonisasi jalan berjalan baik dan sesuai dengan perencanaan awal”*

(AL, kontraktor lokal)



Gambar 2 Alur komunikasi diagonal pada program bantuan dana infrastruktur desa

Selain efisiensi, komunikasi

diagonal juga membangun hubungan kerja lintas sektor yang lebih kuat dan partisipatif. Desa dapat memperoleh arahan langsung dari dinas teknis tanpa harus selalu melalui jalur struktural yang panjang, mempercepat proses dan meningkatkan kepercayaan antar aktor. Pola ini memperluas keterlibatan pelaksana lapangan dalam sistem koordinasi lintas level dan menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai penunjang SDM (Oktapriadi dan Rahman, 2023). Inspektorat yang melakukan pengawasan saat evaluasi program Samisade ke setiap desa dan berkomunikasi dengan kecamatan. Meskipun berjalan lintas jalur, komunikasi diagonal tetap dijaga dalam koridor mekanisme formal agar tidak menabrak sistem birokrasi yang berlaku. Komunikasi diagonal dalam program Samisade yang terjadi antara dinas, kecamartan dan desa berperan penting dalam membangun sinergi lintas struktur pemerintahan. Kombinasi ketiga alur komunikasi ini menjadi fondasi keberlanjutan pelaksanaan program Samisade.

### Komunikasi Organisasi pada Tiap Tahapan Program Bantuan Dana Infrastruktur Desa

Setiap tahapan program Samisade melibatkan proses komunikasi yang terstruktur dan dinamis, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pada tahap perencanaan, komunikasi ke bawah bersifat partisipatif melalui Musrenbangdes yang menentukan titik pembangunan sebelum proposal diajukan dan diverifikasi melalui SIPD. DPMD Kabupaten Bogor bersama UPT PUPR memberikan arahan teknis terkait regulasi, spesifikasi konstruksi, serta lokasi pekerjaan berdasarkan kebutuhan masyarakat (Febrianti et al., 2023). Pada tahap pelaksanaan, komunikasi berfokus pada koordinasi

teknis antara kepala desa, TPK, mitra pelaksana, dan unsur pengawas. Evaluasi dan pelaporan dilakukan melalui komunikasi ke bawah oleh camat dan inspektorat, sedangkan LPJ menjadi sarana komunikasi ke atas untuk menjamin keberlanjutan program di tahun berikutnya.

*“Kami dievaluasi oleh kecamatan, yang juga menjadi tim verifikasi. Untuk jalan diukur panjang, ketebalan, lebar dan kualitas. Selain itu kami juga melaporkan hasil-hasil pengeluaran belanja kegiatan”* (AS, Kepala Desa Kranggan)

### **Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa**

Strategi komunikasi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi alat untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan keterlibatan antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dalam penguatan infrastruktur, komunikasi strategis diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat lokal, menyusun perencanaan yang transparan, serta memastikan adanya dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Selain itu, pendekatan komunikasi yang adaptif terhadap budaya lokal menjadi elemen penting dalam menjembatani kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan komunitas lokal. (Damayanti et.al, 2025) Strategi komunikasi adalah keseluruhan perencanaaan, taktik, cara yang akan dipergunakan guna melancarkan komunikasi dengan memperhatikan keseluruhan aspek yang ada pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (El Islamy, 2019)

### **Strategi Media (Media-Based Strategy)**

Pemerintah Kabupaten Bogor memanfaatkan berbagai media sebagai strategi komunikasi untuk menyebarkan informasi mengenai Samisade Saluran yang digunakan mencakup media cetak maupun *online* (seperti Radar Bogor, Metropolitan, Pakuan Raya dan Jurnal Bogor), media daring (detik.com, Antara, online-online berbasis lokal Bogor ataupun nasional dll.), serta media sosial dan website resmi. Di tingkat desa, media sosial seperti Instagram dan Facebook serta banner dipakai untuk menyampaikan progres pembangunan kepada masyarakat. Penggunaan media massa ini tidak hanya berfungsi sebagai alat sosialisasi, tetapi juga membentuk citra positif dan mendorong partisipasi warga. Dukungan Diskominfo dengan menempatkan operator media sosial sekaligus memberikan pelatihan menambah kualitas penyampaian informasi. Hidayat et al. (2023) dan Lahoti et al. (2023) mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial oleh pemerintah desa mampu memperluas akses informasi, meski masih menghadapi tantangan literasi digital dan infrastruktur jaringan.

*“Kami melaporkan kegiatan pembangunan infrastruktur melalui banner dan spanduk di depan kantor desa. Kemudian, kami juga mem-publish hasil-hasil pembangunan itu seperti foto dan video melalui media sosial seperti IG (Instagram), Facebook, dan website desa.”* (AS, Kepala Desa Cigudeg)

### **Strategi Desain Instruksional**

Strategi ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan rutin yang diberikan kepada operator dan bendahara desa mengenai pengelolaan keuangan dan teknis pelaporan Samisade. Kegiatan

pelatihan ini disusun melalui tiga tahap: perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman desa terhadap regulasi dan sistem pelaporan, serta meminimalisasi kesalahan administrasi. Pelatihan ini melibatkan DPMD, BappedaLitbang, Inspektorat, serta lembaga hukum dan akademisi.

*“Kami mengadakan pelatihan setiap tahun, semua bendahara desa wajib ikut. Kami juga menghadirkan para pemateri dari unsur kejaksaan, Polres Bogor, dan kantor pajak”* (RY, Kepala DPMD)

Pelatihan ini dibagi ke dalam dua atau tiga gelombang dan dilaksanakan di kawasan Puncak Bogor. Kehadiran Aparatur Penegak Hukum (APH) baik dari pihak kepolisian ataupun kejaksaan sebagai pemateri pelatihan dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan pemahaman peserta terkait dengan sanksi, kebijakan hukum yang menjadi konsekwensi seluruh peserta apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan program Samisade. Selain itu, kehadiran pemateri pelatihan dari kantor pajak dimaksudkan memberikan pemahaman kepada para peserta pelatihan mengenai tata cara administrasi perihal pajak yang harus dikeluarkan pihak desa dalam program Samisade.

## STRATEGI PEMASARAN

Strategi pemasaran adalah strategi yang dipakai untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan konsumen. Dalam hal pembangunan Pemkab Bojonegoro, konsumen yang dimaksud adalah warga Bojonegoro. Kang Yoto menggunakan strategi pemasaran dengan mengemas nilai-nilai pembangunan dengan pendekatan budaya, seperti festival budaya agar lebih mudah diterima warga

Bojonegoro. Festival kebudayaan dilakukan Kang Yoto untuk memadukan alam sekaligus manusia agar dapat bersinergi dan berhubungan dengan baik. (Ramadhani, 2020)

Strategi pemasaran dalam program Samisade dilakukan dengan pendekatan kultural dan sosial seperti program **Boling** (Rabu Keliling) dan **Jumling** (Jumat Keliling) untuk menyosialisasikan Samisade secara langsung kepada masyarakat desa. Kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, dan unsur pemerintah daerah. Strategi ini berhasil menciptakan keterhubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan bahwa program-program pembangunan dipahami dan didukung warga. Program Boling dan Jumling juga menjadi sarana Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor *launching* atau meresmikan infrastruktur yang dibiayai Samisade.

*“Rabu keliling ini upaya kami menyerap aspirasi dari masyarakat dan menyosialisasikan program Samisade. Setiap kecamatan dan desa yang ada di kabupaten berkesempatan menjadi tuan rumah kegiatan Rabu Keliling”* (AY, Bupati Bogor Periode 2019-2023)

## Strategi Partisipatori

Strategi partisipatori program dijalankan melalui Musdes, Musrenbangdes, hingga Musrenbang kabupaten. Forum ini memungkinkan masyarakat, LSM, dan tokoh adat/agama, menyampaikan aspirasi secara langsung mengenai pembangunan yang dibutuhkan di desanya. Kegiatan ini juga mendukung mekanisme *bottom-up planning*. Musyawarah di tingkat desa dan kecamatan yang diinstruksikan Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi penting, karena dari hasil musyawarah tersebut, tergambar usulan-usulan pembangunan desa yang dibiayai

Samisade. Untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di tingkat desa dan kecamatan, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui dinas teknis, menggelar pelatihan konten digital bekerja sama dengan IPB. Tujuannya adalah agar *stakeholder* daerah mampu menyampaikan program pembangunan melalui media digital secara kreatif dan informatif.

*“Kami bekerjasama dengan IPB, khususnya dengan Sekolah Vokasi IPB, dengan menghadirkan pemateri-pemateri para dosen untuk melatih staff dinas membuat konten pembangunan digital.”* (BY, Kadiskominfo)

### **Implikasi Kebijakan Program**

Komunikasi organisasi yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam program Samisade memberikan dampak besar terhadap tata kelola pembangunan infrastruktur desa. Infrastruktur dibagi menjadi menjadi tiga oleh The World Bank (1994) yaitu (1) Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan dalam menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya) (2) Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi (3) Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, administrasi dan koordinasi (World Bank, 1994). Efektivitas komunikasi dan pengawasan terbukti dari rendahnya kasus hukum. Ada tiga Kepala Desa dari 416 kepala desa yang kasusnya inkrah di pengadilan. Data inspektorat Kabupaten Bogor menyebutkan, tiga kepala desa tersebut adalah; Desa Kranggan Kecamaan Gunungputri, Desa Cidokom Kecamatan Rumpin dan

Desa Tonjong Kecamatan Tajorhalang. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berjalan baik, dengan pelibatan masyarakat dan verifikasi berlapis dari kecamatan hingga inspektorat. Komunikasi yang terbuka antara desa dan dinas teknis juga mempercepat penyelesaian persoalan teknis di lapangan. Selain itu, Samisade mendorong transformasi desa dari tertinggal menjadi berkembang, maju, hingga mandiri melalui pembangunan infrastruktur dasar. Inovasi pun lahir, seperti pembangunan menara telekomunikasi oleh desa Gunung Putri dan Tangkil saat pandemi Covid-19. Ini menunjukkan bahwa program mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal dan tantangan zaman. Secara keseluruhan, Samisade tidak hanya membangun fisik desa, tetapi juga memperkuat kapasitas dan kemandirian pemerintahan desa.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi organisasi dalam program Samisade di Kabupaten Bogor berjalan secara terstruktur melalui alur vertikal, horizontal, dan diagonal yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Komunikasi vertikal memfasilitasi instruksi dan pelaporan dua arah, komunikasi horizontal mendukung koordinasi antar dinas dan desa, sementara komunikasi diagonal mempercepat penyelesaian masalah lintas level. Strategi komunikasi yang digunakan—meliputi media cetak dan elektronik, strategi partisipatif, strategi instruksional dan strategi pemasaran meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta berdampak positif pada kualitas infrastruktur desa dan tata kelola pemerintahan. Untuk memperkuat efektivitas program,

disarankan agar pemerintah daerah menambah mekanisme umpan balik, meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, serta mengoptimalkan teknologi komunikasi. Evaluasi partisipatif dan penguatan peran pengawasan lintas aktor juga penting untuk menjaga integritas pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa.

## **DAFTAR PUSTAKA.**

- Afriyanto, A., & Diggowiseiso, K. (2023). Studi literatur evaluasi pelaksanaan program dana desa di Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5) hal 4703-4712. Universitas Nasional.
- Bappedalitbang Kab. Bogor. 2020. *Peta Administrasi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.*
- Bessette, G. (2021). Putting people first: participatory development communication and sustainable development in agriculture and natural resource management. In *Handbook of Communication and Development* (pp. 233–244). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781789906356.00021>
- Damayanti, A., Dastuti, P. D., & Taskiyah, E. (2025). Strategi komunikasi dalam penguatan infrastruktur di daerah terpencil. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 24–32.
- El-Islamy, I. (2019). Strategi komunikasi pembangunan Marsipature Hutanabe (partisipatif) masyarakat Desa Doulu Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Komunikasi Islamika: *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam*, 6(2). UIN Sumatera Utara.
- Evelina, L. W., & Angeline, M. (2019). Komunikasi vertikal dan horizontal dalam membentuk gaya kepemimpinan berbasis kearifan lokal: *Studi pada Binus University. Humaniora*, 5(1), 445–454.
- Febrianti Annisa Cikal, Abubakar Iskandar, Rusliandy. (2023) Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur melalui program Samisade terhadap kepuasan masyarakat di Kecamatan Ciawi. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 10(2).
- Fikri. (2020). Gaya Komunikasi Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung kabupaten Donggala. *Jurnal KINESIK Vol.7 No.2* (2020).
- Firli M, et al (2024) Evaluasi Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) Dalam Peningkatan Infrastruktur Di Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Bogor. *Jurnal Karimah Tauhid*, Volume 3 Nomor 3 (2024).
- Hidayat, A. R. T., Onitsuka, K., Sianipar, C. P. M., Basu, M., & Hoshino, S. (2023). To migrate or not to migrate: Internet use and migration intention among rural youth in developing countries (case of Malang, Indonesia). *Digital Geography and Society*, 4, 100052. <https://doi.org/10.1016/j.diggeo.2023.100052>
- Hu, Y., & Ngai, P. (2021). Organizational communications in developing ethnic tourism: participatory approaches in southwest China. *Tourism Culture & Communication*, 21(2), 123–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.3727/109830421X16191799472006>
- [KemenPAN-RB RI]. (2011). *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan*

- Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah.* Jakarta: Kementerian PAN-RB.
- Lahoti, S. A., Withaningsih, S., Lomente, L., Kamiyama, C., De Luna, C., Sahle, M., Malik, A. D., Parikesit, P., Pulhin, J., Hashimoto, S., & Saito, O. (2023). Exploring bioproduction systems in socio-ecological production landscapes and seascapes in Asia through solution scanning using the Nature Futures Framework. *Sustainability Science*, 13(8), 1– 19. <https://doi.org/10.1007/s11625-023-01338-9>
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A. 2009. *Teori Komunikasi*, Edisi 9. Jakarta[ID]: Salemba Humanika
- Michel D, et al 2025. Evaluation of the Samisade (Satu Miliar Satu Desa) Program in Bogor Regency. *International Journal of Social Science and Business*
- Mirza, A. R. (2018). *Tafsir kontemporer ilmu komunikasi*. Tangerang: Indogo Media.
- Mintarsih, M., et al. (2023). Upaya pembangunan desa melalui program Samisade di Kabupaten Bogor. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2). [https://doi.org/\[tambahkan jika ada DOI\]](https://doi.org/[tambahkan jika ada DOI])
- Mulawarman, K., & Rosilawati, Y. (2014). Komunikasi organisasi pada dinas perijinan Kota Yogyakarta untuk meningkatkan pelayanan. *Jurnal Makna*, 5(1), 31– 41. <https://doi.org/10.30659/jkm.5.1.31-41>
- Oktapiadi, R., & Rahman, A. (2023). Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan Satu Miliar Satu Desa di Kabupaten Bogor (Studi di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi). *Swatantra*, 21(2), 161– 168. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- [Pemkab Bogor]. (2020). *Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/173722/perbup-kab-bogor-no-83-tahun-2020>
- [Pemkab Bogor]. (2021). *Peraturan Bupati No. 100 Tahun 2021*.
- [Pemkab Bogor]. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Prasetyo, F., Firdaus. (2009). Pengaruh Infrastruktur pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 222-236.
- Purnomo, A. (2018). Pelaksanaan kebijakan komunikasi organisasi pemerintah di Indonesia. *Jurnal Noken*. Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong.
- Ramadhani Rizky Wulan, Edy Prihantono. (2020). Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan Vol.18 (02) 2020 / 117-129.* <https://doi.org/10.46937/1820208913>
- Warat, A. R., & Tuanaya, W. (2024). Organizational communication in village governance: Multidirectional interactions to promote development participation. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(1), 46–62. <https://doi.org/10.30598/populis.19>.

1.46-62

Wang, R. Y., & Liu, Q. (2022). Probing NGO-community Interactions through Village Cadres and Principal-agent Relationships: Local Effects on the Operation of NGO Projects in Rural China. *Journal of Contemporary China*, 31(135), 445–458. <https://doi.org/10.1080/10670564.2021.1966904>

[WB]. 1994. *World Development Report: infrastructure for development*. New York (US):

Oxford University Press, Inc.

Yin, R. K. (2002). *Studi kasus: Desain dan Metode*. Jakarta[ID]: Raja Grafindo Persada.

Zheng, H., Lou, K., Yang, Y., Wang, H., & Lu, Y. (2023). The Impact of Government Support and Social Networks on Peasants' Effective Participation in High-Standard Farmland Construction: Evidence from Yancheng City, China. *Land*, 12(5), 955. <https://doi.org/10.3390/land12050955>